

## PENGARUH ASAS *PACTA SUNT SERVANDA* DALAM KONTRAK KARYA TERHADAP DIVESTASI SAHAM PT. FREEPORT INDONESIA

A. Rahabistara Ditiagonzaga<sup>1</sup>, Hendra Haryanto<sup>2</sup>, Pater Y. Angwarmasse<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

<sup>2,3</sup> Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

### ABSTRAK

Kontrak karya dibuat pada saat pemerintah Indonesia tidak memiliki konsep mengenai kontrak pertambangan sebagaimana mestinya. Konsep *production sharing contract* yang dipakai dalam bidang pertambangan minyak dan gas tidak sesuai karena pertambangan mineral dan batubara memerlukan dana investasi dalam jumlah yang lebih besar dan rentang waktu yang lama sehingga membutuhkan kepastian hukum. Kemudian rezim pemerintahan berganti dan konsep penerimaan negara secara global berubah ketika negara-negara berkembang yang di eksploitasi kekayaan alamnya menuntut penerimaan negara yang lebih besar melalui konsep divestasi saham. Indonesia sebagai negara yang turut mengadopsi konsep tersebut melalui Pasal 112 *juncto* Pasal 169 huruf b UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terkendala dengan asas *pacta sunt servanda* yang kerap kali disamakan dengan prinsip kesucian kontrak. Akibatnya ialah implementasi dari aturan tersebut tertunda hingga 8 Tahun. Untuk mewujudkan hal tersebut asas *pacta sunt servanda* atau kesucian kontrak haruslah dilanggar dengan menerapkan asas *rebus sic stantibus* atau *hardship clause* dan asas *permanent sovereignty over natural resources* yang pada hakikatnya ada untuk menyeimbangkan asas *pacta sunt servanda* agar aturan divestasi saham dapat diimplementasikan sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.

**Kata Kunci:** *pacta sunt servanda*, kontrak karya, divestasi saham.

### ABSTRACT

*Contract of Work was made at a time when the Indonesian Government did not have a proper mining contract. The concept of Production Sharing Contracts used in the oil and gas industry is not compatible with mineral and coal mining which have required investment funds in larger amounts and a long period of time so that requires legal certainty. Then the government regime changed and the concept of global state revenue changed developing countries that exploited their natural resources asked for greater state revenue through the concept of divestment. Article 112 letter b of Law Number 4 of 2009 Mineral and Coal Mining is constrained by the principle of pacta sunt servanda which is often equated with trade agreements 8 years ago. To realize this, the Principle of Pacta Sunt Servanda or the Sanctity of Contract must be violated by applying the Principle of Rebus Sic Stantibus or Hardship Clause and the Principle of Permanent Sovereignty over Natural Resources which in essence must balance the Principle of Pacta Sunt Servanda injection to conform to the mandate of Article 33 of the Constitution 1945.*

**Keywords:** *pacta sunt servanda*, contract of work, divestment.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang dengan pembangunan di segala bidang sebagai upaya berkelanjutan yang mencakup seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>1</sup> Sebagai negara berkembang yang memiliki sumber daya alam yang luar biasa, Indonesia akan diburu oleh perusahaan multinasional yang berasal dari negara-negara maju yang memiliki kesiapan dari segi modal dan teknologi untuk dapat mengolah setiap sumber daya alam yang terkandung di dalam bumi Indonesia tersebut untuk kemudian dapat dijual dan dipasarkan.

Dalam perkembangannya melalui sumber daya alam yang luar biasa tersebut kemudian pemerintah Indonesia melakukan segala upaya untuk mendukung sektor pertambangan yang di kemudian hari akan menjadi salah satu sektor yang memegang peranan penting untuk mewujudkan tujuan negara yang termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Kalimat tersebut kemudian dapat ditafsirkan sebagai berikut bahwa kekayaan alam tersebut diamanatkan kepada negara melalui pemerintah untuk digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum yang merdeka berdaulat, adil dan makmur.<sup>2</sup>

Negara sebagai pemegang hak untuk mengatur dan menentukan status hukum pengelolaan dan pengusahaan sumber daya alam berperan sangat penting untuk menentukan pemegang konsesi atas sumber daya alam agar kelak konsesi tersebut tidak merugikan rakyat dan ketika suatu konsesi

telah dibuat antara suatu badan hukum melalui skema penanaman modal asing dengan pemerintah Indonesia melalui suatu perjanjian baik dalam bentuk kontrak karya, perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) maupun bentuk lainnya<sup>3</sup> yang hendaknya dihormati sesuai dengan norma hukum internasional yang ada pada *Article 26 Vienna Convention on The Law of Treaties* yang disebut dengan *pacta sunt servanda* atau *agreement must be kept*.<sup>4</sup>

*Pacta sunt servanda* atau *agreement must be kept* berasal dari mazhab hukum alam yang menyatakan bahwa *pacta sunt servanda* ada dalam tiap ajaran agama yang pada intinya menyatakan layaknya janji terhadap Yang Maha Kuasa maka setiap janji yang telah disepakati dengan itikad baik haruslah dilaksanakan dan dihormati.

Beberapa kaidah di masyarakat memiliki moral yang mendalam dan dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat tersebut seperti prinsip kesucian kontrak (*sanctity of contract*) atau *Pacta Sunt Servanda*.<sup>5</sup> Pada zaman purbakala, asas ini berkembang di daerah timur oleh bangsa Akkadia (*Neo-Babel*), bangsa Mesir, dan bangsa China.<sup>6</sup> Menurut bangsa-bangsa ini, dewa-dewa mereka akan mengambil bagian setiap kali ada pembuatan kontrak.<sup>7</sup> Pada dewa menjadi penjamin dari kontrak-kontrak yang dibuat tersebut dan mereka akan mengancam para pihak yang melakukan pelanggaran kontrak.<sup>8</sup> Hal inilah yang kemudian membuat kontrak mengikat dalam suatu formula kepercayaan yang mendalam.<sup>9</sup>

Asas ini berkembang pula terhadap orang-orang di daerah mediterania yang memiliki ketertarikan dalam membuat aturan di bidang perdagangan.<sup>10</sup> Mereka

1 Nanik Trihastuti, *Hukum Kontrak Karya Pola Kerjasama Pengusahaan Pertambangan di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 1.

2 Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 60.

3 Nanik Trihastuti, *Loc.cit*.

4 United Nations, *Vienna Convention on The Law of Treaties* 1969, artikel 27.

5 Hans Wehberg, “Pacta Sunt Servanda”, *American Journal of International Law*, Volume 53 Issue 4, (1959), hlm. 775.

6 *Ibid*.

7 *Ibid*.

8 *Ibid*.

9 *Ibid*.

10 *Ibid.*, hlm. 776.

kemudian menambahkan unsur kepercayaan dalam setiap aturan perdagangan yang dibuat termasuk asas ini.<sup>11</sup> Mengetahui hal tersebut *sense of judicial* bangsa Romawi bangkit dan merasakan bahwa aturan perdagangan yang baik hanya bisa dibuat apabila sebuah kontrak bisa ditepati.<sup>12</sup> Kemudian bangsa Romawi menyatakan bahwa sebuah kontrak berada dalam perlindungan ilahi dan secara psikologis mereka merasakan hal tersebut.<sup>13</sup>

Kaum Nasrani turut pula memberikan dampak yang besar terhadap prinsip kesucian kontrak (*sanctity of contract*) atau *pacta sunt servanda*.<sup>14</sup> Hal tersebut didasarkan pada sebuah ide bahwa kata-kata harus ditepati sebagaimana yang dinyatakan dalam Injil Matius Pasal 5 ayat (33) hingga (37).<sup>15</sup> Prinsip kesucian kontrak juga dipegang teguh oleh kaum muslim sebagaimana yang dinyatakan oleh Hans Wehberg bahwa:

*“Sanctity of Contract atau Pacta Sunt Servanda has also a religious basis Muslims must abide by their stipulations. This is clearly expressed by the Koran in many places, for example, where it is said Be you true to the obligations which you have undertaken.... Your obligations which you have taken in the sight of Allah.... For Allah is your Witness.”*<sup>16</sup>

Pada zaman pertengahan, setelah kerajaan Charlemagne runtuh, keinginan untuk menyatukan negara mulai hancur

dan munculnya era perbudakan. Sistem feodal mulai terlibat dalam rantai dari prinsip kontrak tersebut, secara sukarela majikan dan buruh dalam sistem feodal terlibat masuk dalam sebuah kontrak untuk mencegah kesewenang-wenangan dari majikan. Dengan esensi yang demikian maka kesucian sebuah perjanjian (*sanctity of contract*) menjadi sangat signifikan nilainya guna mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak.<sup>17</sup>

Pada awal negosiasi dengan PT. Freeport Indonesia, Pemerintah Indonesia telah menawarkan skema bagi hasil seperti di minyak dan gas bumi tetapi ditolak oleh PT. Freeport Indonesia.<sup>18</sup> Karena pemerintah Indonesia tidak memiliki argumentasi maka pemerintah meminta PT. Freeport Indonesia membuat kerangka kontrak yang kemudian ditindaklanjuti oleh Bob Duke sebagai ahli hukum PT. Freeport Indonesia yang selanjutnya disebut kontrak karya.<sup>19</sup> Kontrak karya pertama sendiri sebenarnya belum berakhir karena PT. Freeport Indonesia yang berubah menjadi PT. Freeport Indonesia Company kemudian mengubah jangka waktu kontrak dan menjadi kontrak karya kedua pada tanggal 30 Desember 1992. Kontrak karya kedua antara PT. Freeport Indonesia Company dengan pemerintah Indonesia ditandatangani pada tahun 1991.<sup>20</sup>

Seiring dengan perkembangan peraturan sektor pertambangan di dunia global, lahirlah sebuah konsep yang memperbesar porsi kepemilikan negara terhadap sumber daya alamnya yang sedang dikelola oleh perusahaan tambang berdasarkan kepentingan umum yang disebut divestasi saham. Konsep divestasi saham datang dari keprihatinan negara-negara di Afrika seperti Sudan melalui *Sudan Accountability and Divestment Act 2007* mengenai rendahnya royalti yang diterima negara-negara tersebut yang berbanding terbalik dengan

11 *Ibid.*

12 *Ibid.*

13 *Ibid.*

14 *Ibid.*

15 Injil Matius Pasal 5 ayat (33) hingga (37) menyatakan bahwa: “Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita: Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan; (5:34) tetapi Aku berkata kepadamu: Janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah; (5:35) maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kaki-Nya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Besar; (5:36) janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambutpun; (5:37) jika ya, hendaklah kamu katakan: ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan: tidak. Apa yang lebih dari pada itu berasal dari si jahat.”

16 Hans Wehberg, *Op.cit.*, hlm. 776.

17 David Hughes Parry, *The Sanctity of Contracts in English Law*, (London: The Hamlyn Trust, 1959), hlm. 5.

18 *Ibid.*

19 Nanik Trihastuti, *Op.cit.*, hlm. 43.

20 *Ibid.*

keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan-perusahaan pertambangan multinasional yang mengeksploitasi kekayaan alam mereka. Pemerintah Indonesia kemudian turut mengadopsi konsep divestasi saham melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.<sup>21</sup>

Divestasi saham merupakan sebuah upaya untuk menegaskan kontrol negara yang lebih besar atas sumber daya mineral. Melalui divestasi saham pemerintah berharap aturan tersebut akan menguntungkan masyarakat Indonesia lewat 2 (dua) cara, yaitu:<sup>22</sup> *Pertama*, hal tersebut memungkinkan masyarakat Indonesia yang memegang saham di perusahaan pertambangan secara langsung mendapatkan manfaat dari bisnis mereka, dibandingkan secara tidak langsung melalui penerimaan pajak; *Kedua*, hal ini memungkinkan perusahaan-perusahaan Indonesia untuk memperoleh teknologi pertambangan baru dan mengembangkan praktik-praktik bisnis baru, mendorong lapangan pekerjaan dan peluang usaha domestik yang lebih besar di negara ini. Aturan divestasi juga merupakan bagian dari rencana pemerintah untuk membangun perusahaan milik negara (BUMN) yang lebih kuat di sektor pertambangan.<sup>23</sup>

Kewajiban untuk melakukan divestasi saham diatur pada Pasal 169 huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mensyaratkan penyesuaian akan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) yakni kewajiban pembuatan smelter (pabrik untuk proses pemurnian hasil tambang) dan divestasi saham. Namun hal ini

menimbulkan masalah pokok karena adanya ketentuan kontrak karya dalam Pasal 24 ayat (2) tentang Promosi Kepentingan Umum, yang dapat menghadirkan perdebatan karena jika dilihat dari sisi tujuannya maka klausul tersebut tidaklah berbeda dengan divestasi saham akan tetapi bila dilihat dari mekanisme penjualan sahamnya maka klausul tersebut berbeda dengan divestasi saham. Hal ini tentunya bukan perkara yang mudah terbukti dari ditundanya pelaksanaan divestasi saham hingga 8 tahun dan baru diselesaikan pada Desember tahun 2018.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka dibutuhkan pendekatan hukum yang berbeda untuk menganalisa masalah pengaruh asas *pacta sunt servanda* yang mengikat kedua belah pihak baik pemerintah Indonesia maupun PT. Freeport Indonesia dan ditaati serta dijunjung setinggi-tinggi layaknya sesuatu yang suci (*sanctity of contract*) mengingat klausula Pasal 24 ayat (2) Kontrak Karya Tentang Promosi Kepentingan Nasional, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh asas *pacta sunt servanda* dalam kontrak karya terhadap divestasi saham PT. Freeport Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?
2. Bagaimana implementasi dari aturan divestasi saham dapat dioptimalkan agar sesuai dengan semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

## **PEMBAHASAN**

Setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat harus selalu dilandasi dengan suatu asas atau kaidah atau prinsip dasar, karena bila suatu peraturan perundang-undangan tidak didasari oleh suatu kaidah hukum maka dalam sekejap rumah yang bernama peraturan perundang-undangan

21 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Hukum Divestasi di Indonesia (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 2/SKLN-X/2012)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 19.

22 Trias Kurnianingrum, "Bagian I Kajian Hukum atas Divestasi Saham Bidang Pertambangan di Indonesia (Studi Kasus PT Newmont Nusa Tenggara dan PT Freeport Indonesia)", [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku\\_lintas\\_tim/buku-lintas-tim-8.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku_lintas_tim/buku-lintas-tim-8.pdf), diakses 27 Oktober 2018.

23 *Ibid.*



tersebut akan hancur seketika. Asas sendiri merupakan suatu kaidah yang berisikan mengenai hal yang dilarang atau diperbolehkan, asas tersebut bersifat abstrak dan umum yang berada di belakang dan di dalam setiap peraturan perundang-undangan. Selain itu, asas tersebut juga dicurahkan dalam setiap putusan pengadilan.<sup>24</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo yang menyimpulkan pendapat Bellefroid, van Eikema Hommes, The Liang Gie, dan Paul Scholten sebagaimana yang dikutip oleh Amin Bendar menyatakan bahwa:

“Asas hukum bukanlah sebuah peraturan hukum konkret akan tetapi tidak ada peraturan hukum yang dapat dipahami tanpa adanya suatu asas hukum. Hal ini terjadi karena asas hukum memberikan sebuah makna etis di dalam suatu peraturan hukum.”<sup>25</sup>

Nieuwenhuis mengatakan asas hukum merupakan:

“Bagian terpenting dari sebuah peraturan hukum, hal ini timbul disebabkan oleh adanya dua alasan yaitu:

1. Kaidah hukum merupakan dasar terluas dari suatu peraturan hukum sehingga implementasi suatu peraturan hukum dapat dipahami dari kaidah hukumnya;
2. Kaidah hukum merupakan tali penyambung antara peraturan hukum yang berlaku dengan tujuan sosial dan paradigma etis dari masyarakat.”<sup>26</sup>

Dari dua hal tersebut didapatkan suatu kesimpulan bahwa asas hukum bukan hanya suatu syarat yang bersifat *legal* formal akan tetapi juga berfungsi sebagai batasan etis atau *moral obligation* dari suatu peraturan hukum.<sup>27</sup>

*Pacta sunt servanda* termuat dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi:

“Setiap perjanjian yang dibuat sesuai peraturan hukum berlaku memiliki kedudukan seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*alle wettiglick gemaakte overeenkomsten strekken denegen die dezelve hebben aangegaan tot et*); perjanjian tersebut hanya ditarik kembali melalui kesepakatan kedua belah pihak atau dengan alasan undang-undang yang menyatakan cukup untuk itu (*zij kunnen niet herroepen worden, en wet daartoe voldoende verklaard*); dan perjanjian yang telah dibuat harus diimplementasikan dengan itikad baik (*zij moeten te goeder truw worden ten uitvoer gebracht*).”<sup>28</sup>

Setiap perjanjian yang dibuat sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku merupakan perjanjian yang sah dan mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.<sup>29</sup> Prinsip ini diberlakukan sejak Januari 1848 oleh pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia melalui asas konkordansi dalam KUH Perdata yang bersumber dari *code napoleon*. Prinsip ini kemudian diakui secara internasional dalam *Article 26 Vienna Convention 1969 on The Law of Treaties* yang dapat diterjemahkan sebagai berikut setiap perjanjian yang berlaku mengikat para pihak yang membuatnya dan harus diterapkan oleh mereka dengan itikad baik.

Asas *pacta sunt servanda* dalam kontrak karya yang menjadi permasalahan terdapat dalam klausula Pasal 24 ayat (2) tentang Promosi Kepentingan Nasional.<sup>30</sup>

24 Harry Purwanto, “Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional”, *Mimbar Hukum*, Volume 21 No 1 (2009), hlm. 111, doi: <https://doi.org/10.22146/jmh.16252>.

25 Amin Bendar, *Hukum Penanaman Modal Asing Implementasi untuk Pertambangan di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2018), hlm. 38.

26 *Ibid.*, hlm. 30.

27 David Hughes Parry, *Op.cit.*, hlm. 2.

28 Amin Bendar, *Op.cit.*, hlm. 42.

29 Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staadblad Tahun 1847 Nomor 23)*, Pasal 1338.

30 Klausula Pasal 24 ayat (2) Tentang Promosi Kepentingan Nasional berbunyi: “Sewaktu-waktu selama jangka waktu yang telah ditetapkan dalam pasal ini, perusahaan akan menawarkan untuk dijual atau menyuruh menawarkan untuk dijual saham-saham dari modal saham perusahaan guna mendukung kebijaksanaan pemerintah Indonesia dalam mendorong kepemilikan perusahaan-perusahaan Indonesia oleh Pihak Nasional Indonesia sebagaimana

Asas *pacta sunt servanda* dibatasi oleh adanya ketentuan *force majeure* atau keadaan kahar yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti bencana alam, krisis ekonomi, perang, dan lain sebagainya.<sup>31</sup> Jika keadaan kahar terpenuhi maka asas *pacta sunt servanda* menjadi tidak bisa dilaksanakan akibatnya maka klausula-klausula yang termuat dalam perjanjian yang sebelumnya disepakati oleh para pihak menjadi tidak dapat diterapkan.<sup>32</sup>

Doktrin ketiga mengenai pembatasan terhadap asas *pacta sunt servanda* selain didasarkan adanya *force majeure* atau keadaan kahar<sup>33</sup> ialah adanya perubahan-perubahan fundamental yang bertentangan dengan harapan para pihak mengenai isi perjanjian tersebut sehingga perubahan-perubahan tersebut mengalahkan tujuan dari perjanjian tersebut. Perubahan tersebut secara teoretis telah menjadi bagian dari suatu kaidah yang fundamentalnya berlawanan dengan asas *pacta sunt servanda*. Kaidah tersebut ialah kaidah *rebus sic stantibus* atau yang juga dikenal sebagai *hardship clause*.<sup>34</sup> *Rebus sic stantibus* bila diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris adalah:

“As long as things remain the same”.  
*This brocardum implies that a party is bound to perform a promised obligation, as long as the circumstances underlying the promise remain the same.*”<sup>35</sup>

Sedangkan dalam terminologi di beberapa negara Eropa menggunakan istilah *rebus sic stantibus* ini dengan *Imprévision* di Perancis, *frustration of purpose* di Inggris,

diatur dalam Pasal 24 ayat (2). Untuk tujuan pasal ini, istilah Pihak Nasional Indonesia berarti Warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia yang sah yang dikuasai oleh Warga Negara Indonesia atau pemerintah Republik Indonesia.”

31 *Ibid.*

32 Nanik Trihastuti, *Op.cit.*, hlm. 59.

33 *Ibid.*

34 Christina Binder, “The Limits of Pacta Sunt Servanda in International Law”, *Leiden Journal of International Law*, Volume 245, (2013), hlm. 672.

35 Suherman, *Perkembangan Asas Rebus Sic Stantibus (Perubahan Keadaan Fundamental) dalam Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2017), hlm. 2.

*voraussetzung* di Jerman, *presupposizione* di Italia, sedangkan dalam konvensi-konvensi internasional asas ini mengarah dengan istilah *hardship*.<sup>36</sup> *Rebus sic stantibus* atau yang juga dikenal sebagai *hardship clause* atau perubahan keadaan yang bersifat mendasar (fundamental) merupakan doktrin yang memungkinkan suatu perjanjian tidak dapat lagi dilaksanakan karena adanya perubahan keadaan yang bersifat mendasar atau fundamental.<sup>37</sup> Mochtar Kusumaatmadja mengatakan kemudian bahwa *force majeure* atau keadaan kahar memiliki perbedaan dengan *rebus sic stantibus* atau *hardship clause*.<sup>38</sup>

Keadaan kahar atau *force majeure* merupakan suatu keadaan yang tidak lagi memungkinkan para pihak untuk melaksanakan hal-hal yang telah diperjanjikan yang terjadi di luar kekuasaan para pihak karena hilangnya atau musnahnya atau rusaknya objek perjanjian. Sementara *rebus sic stantibus* atau *hardship clause* sendiri lebih menekankan terhadap suatu perubahan keadaan yang bersifat mendasar dan tidak seimbang di antara para pihak.<sup>39</sup>

Bila pada *force majeure* para pihak tidak memungkinkan lagi untuk memenuhi perjanjian sementara akibat hukum dari kaidah *rebus sic stantibus* atau *hardship clause* terhadap suatu kontrak ialah pihak yang dirugikan dimungkinkan untuk melakukan renegotiasi (negosiasi ulang),<sup>40</sup> seperti pada kontrak karya pertambangan antara PT. Freeport Indonesia dengan pemerintah Indonesia.

Kaidah *rebus sic stantibus* telah menjadi objek penelitian yang cukup lama dan sering digunakan oleh negara-negara di dunia untuk melakukan penundaan pemberlakuan perjanjian.<sup>41</sup> Berdasarkan sejarah, Indonesia pernah menerapkan kaidah *rebus sic stantibus*

36 *Ibid.*

37 United Nations, *Vienna Convention on The Law of Treaties 1969*, *Op.cit.*, artikel 62.

38 Suherman, *Op.cit.*, hlm. 6.

39 *Ibid.*

40 *Ibid.*, hlm. 8.

41 *Ibid.*, hlm. 5.

dalam kasus perjanjian internasional antara Australia dan Indonesia mengenai zona kerja sama di celah Timor-Timor. Indonesia kemudian memutuskan secara sepihak perjanjian internasional tersebut karena telah terjadi perubahan vital di dalam negeri terkait perjanjian tersebut.<sup>42</sup>

Pada mulanya kaidah *rebus sic stantibus* digunakan untuk melunakkan hukum privat Romawi yang bersifat kaku. Kaidah ini juga telah digunakan sejak abad ketujuh dan kedelapan oleh para ahli hukum kanonik yang diungkapkan dalam bahasa latin yakni:

“*Contractus qui habent tractum succesivum et dependentium de future Rebus Sic Stantibus intelliguntur.* (Perjanjian menentukan perbuatan yang akan dilakukan selanjutnya yang pada pelaksanaannya di masa yang akan datang harus tunduk pada persyaratan lingkungan dan keadaan di masa yang akan datang yang tetap sama).”<sup>43</sup>

Pendapat ini ditentang oleh Bynkershoek akan tetapi justru diakuinya dengan menyarankan kepada penguasa untuk melepaskan segala janji apabila tidak memiliki kemampuan untuk menaati perjanjian tersebut.<sup>44</sup> Bierly menguatkan dengan menambahkan syarat bahwa suatu perjanjian hanya mengikat bila keadaan-keadaan yang terjadi di kemudian hari masih sama dengan keadaan awal pada waktu perjanjian tersebut dilakukan.<sup>45</sup>

Pada abad kelima belas hingga kedelapan belas kaidah *rebus sic stantibus* sempat memudar bahkan menghilang<sup>46</sup> karena adanya penerapan secara luas

kaidah *rebus sic stantibus* secara komersial sehingga mengakibatkan meningkatnya ketidaksamaan di seluruh Eropa.<sup>47</sup> Efek selanjutnya dari menghilangnya kaidah *rebus sic stantibus* ialah meningkatnya asas *pacta sunt servanda* bahkan hingga mencapai puncaknya. Akan tetapi, asas *rebus sic stantibus* mulai dimunculkan kembali setelah meningkatnya skala peperangan di Eropa yang dikenal dengan Perang Dunia I, dengan keadaan yang seperti itu para ahli hukum di Eropa mulai mencari dasar hukum untuk memberikan kelonggaran kepada pihak yang dituntut untuk memenuhi suatu prestasi yang nyatanya sangat sulit untuk dipenuhi.<sup>48</sup>

Perang Dunia I mengakibatkan kerusakan dan kerugian di semua bidang sehingga atas kondisi tersebut para ahli hukum Eropa mulai kembali menggunakan kaidah *rebus sic stantibus* dengan unsur-unsur yang berbeda. Kaidah *rebus sic stantibus* kemudian diwujudkan dalam peraturan hukum positif internasional melalui Pasal 62 Konvensi Vienna Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian yang mencantumkan ketentuan mengenai perubahan-perubahan mendasar (fundamental) yang dapat mengakibatkan pengakhiran dan penundaan perjanjian internasional bahwa suatu negara dapat menggunakan ketentuan perubahan keadaan mendasar sebagai alasan untuk mengakhiri atau menarik diri dari perjanjian bila dapat dibuktikan bahwa keadaan secara nyata telah berubah dan para pihak dalam perjanjian tersebut sama-sama bersepakat dan juga perubahan tersebut secara nyata telah mengubah kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak tersebut sesuai dengan isi perjanjian tersebut.<sup>49</sup>

Tidak hanya pada bidang hukum perjanjian internasional yang bersifat publik, kaidah *rebus sic stantibus* juga telah memperoleh pengakuan dalam bidang kontrak internasional yang bersifat privat dengan dicantumkannya pengaturan

42 Ibid., hlm. 3.

43 Harry Purwanto, *Op.cit.*, hlm. 109.

44 Ibid., hlm. 110.

45 Suherman, *Op.cit.*, hlm. 3.

46 Tidak diakuinya asas *rebus sic stantibus* terlihat dalam artikel 1134 Kode Napoleon yang berbunyi: “*Agreement legally made take a place of law for those who make them. They may be revoked only by mutual consent or for causes which the law authorizes. They must be executed in good faith.* (Asas *rebus sic stantibus* perlu digunakan secara hati-hati sekali agar tidak disalahgunakan atau digunakan sebagai alasan pembenar bagi suatu negara untuk tidak melaksanakan suatu kewajiban dalam kontrak).”

47 Harry Purwanto, *Op.cit.*, hlm. 110.

48 Suherman, *Op.cit.*, hlm. 4.

49 Harry Purwanto, *Loc.cit.*

mengenai *rebus sic stantibus* sebagai salah satu upaya untuk memadupadankan antara hukum kontrak internasional dengan hukum perjanjian internasional oleh UNIDROIT, *Principles of International Commercial Contracts* (UPICC). Selain kaidah tersebut kaidah yang kemudian juga dipadupadankan ialah *pacta sunt servanda*. Dalam UNIDROIT, terminologi yang digunakan untuk *pacta sunt servanda* tetap sama sementara untuk *rebus sic stantibus* digunakan terminologi *hardship clause* (klausula kesulitan).<sup>50</sup>

Kedua kaidah tersebut kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan Statuta Lembaga Internasional untuk Unifikasi Hukum Perdata (*Statute of The International Institute for The Unification of Private Law*).<sup>51</sup> UNIDROIT telah mengadopsi kaidah *rebus sic stantibus* pada bagian ke-2 di bawah judul *hardship clause* mengenai suatu kontrak yang harus dilaksanakan (*contract to be observed*) memiliki 2 syarat pokok yaitu:

“Syarat mengikat dari suatu kontrak sebagai peraturan yang bersifat umum (*binding character of the contract the general rule*) dan perubahan keadaan yang relevan terkait kontrak-kontrak tertentu.”<sup>52</sup>

Melalui pengertian *hardship* yang dinyatakan oleh UNIDROIT berikut keempat persyaratannya maka terdapat tiga unsur untuk menentukan adakah batasan terhadap *pacta sunt servanda* terkait *hardship clause* (klausula kesulitan) dalam suatu kontrak dapat ditentukan melalui tiga hal yakni:

“Adanya perubahan keseimbangan kontrak yang bersifat mendasar; meningkatnya biaya pemenuhan kontrak; dan menurunnya nilai pemenuhan kontrak yang diterima oleh salah satu pihak.”<sup>53</sup>

Perubahan keadaan mendasar telah terjadi di Indonesia karena pergeseran tampuk kekuasaan pada tahun 1998 sehingga setelahnya telah terjadi beberapa perubahan mendasar yang membuat asas *pacta sunt servanda* dalam Pasal 24 ayat (2) Kontrak Karya Tentang Promosi Kepentingan Nasional dapat dikesampingkan atau diimbangi yaitu:

“Dari sistem yang didasarkan pada kekuasaan menjadi sistem yang didasarkan pada hukum; dari sentralisasi menjadi desentralisasi; dari pemerintahan yang otoriter menjadi demokratis; dan dari intervensi pemerintah yang sangat kuat dan besar pada dunia usaha menjadi berkurangnya intervensi pemerintah.”

Selain asas *rebus sic stantibus* (perubahan keadaan yang fundamental) yang dapat digunakan untuk membatasi asas *pacta sunt servanda* yakni asas *permanent sovereignty over natural resources* atau *eminent domain*.

Asas *Permanent Sovereignty Over Natural Resources* (PSNR) merupakan kaidah hukum internasional yang menyeimbangkan kepentingan kedua belah pihak antara negara tuan rumah dan penanam modal asing dengan memperhatikan hukum nasional dari negara tuan rumah dan perkembangan hukum internasional.<sup>54</sup> Nico Schrijver menyatakan bahwa:

“Asas kedaulatan penuh suatu negara terhadap sumber daya alam (*permanent sovereignty over natural resources*) merupakan asas baru yang penuh perdebatan yang muncul setelah Perang Dunia II berakhir. Setelah periode penjajahan berakhir dan banyak negara baru yang terbentuk bermunculan maka negara-negara baru tersebut mencari asas-asas hukum internasional baru untuk menegaskan dan memperkuat

50 Ibid.

51 Suherman, *Op.cit.*, hlm. 7.

52 Ibid.

53 Ibid., hlm. 8.

54 Cut Asmaul Husna TR, “Adopsi Prinsip Permanet Sovereignty Over Natural Resources (PSNR) Migas”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Malikusaleh Aceh*, (2016), hlm. 466.



posisi negara-negara tersebut dalam membina hubungan internasionalnya dengan negara-negara lain sekaligus meningkatkan kepentingan sosial dan ekonomi negara-negara tersebut.”<sup>55</sup>

Di dalam asas ini terkandung hak berdaulat negara terhadap kekayaan alamnya yang menurut Nico Schrijver ialah:

“Hak untuk memiliki, menggunakan dan kemerdekaan untuk memanfaatkan kekayaan alamnya, hak untuk secara bebas menentukan dan mengawasi potensi, eksplorasi, pembangunan, eksploitasi, pemanfaatan dan pemasaran kekayaan alamnya, hak untuk melakukan pengelolaan dan konversi sumber kekayaan alam negara sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional dan lingkungannya, hak untuk membuat pengaturan penanaman modal, termasuk pengaturan terhadap masuknya penanaman modal asing dan kegiatan para investor, termasuk aliran keluar penanaman modalnya dan hak untuk menasionalisasi atau eksplorasi harta milik, baik milik warga negaranya atau warga negara asing (dengan memberikan ganti rugi).”<sup>56</sup>

Sebelum Perang Dunia II, sumber daya alam bukanlah bidang ilmu yang diminati oleh banyak negara namun seiring dengan perkembangan hukum laut internasional membawa perubahan dengan dibentuknya cabang ilmu yang mempelajari masalah sumber daya alam. Namun setelah Perang Dunia II berakhir, masalah sumber daya alam banyak dibicarakan di berbagai forum dan kemudian turut mempengaruhi pembuat kebijakan dan para praktisi hukum terutama dengan dampak negatif dari eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam.<sup>57</sup>

Prinsip ini berkembang setelah masa Perang Dunia II dan didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui:

“Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 626 (VII) 21 Desember 1952 tentang penentuan nasib sendiri di bidang ekonomi (*economic self-determination*). Dalam resolusi tersebut ditegaskan mengenai hak setiap negara untuk memanfaatkan dan mengeksploitasi secara bebas kekayaan dan sumber daya alamnya, ke manapun yang dikehendaki untuk kemajuannya dan pengembangan ekonomi.”<sup>58</sup>

“Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1803 (XVII) 14 Desember 1962 memberikan dampak yang besar bagi negara-negara berkembang untuk menuntut kedaulatan penuh atas sumber daya alam strategis yaitu:

1. Setiap negara berdaulat atas sumber kekayaan alam;
2. Pembagian keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya alam tidak boleh merusak kedaulatan suatu negara;
3. Kerja sama internasional untuk pembangunan ekonomi dilaksanakan atas dasar penghormatan terhadap kedaulatan negara atas sumber kekayaan alam yang dimilikinya;
4. Hak dan kedaulatan rakyat dan bangsa atas kekayaan alam yang dimilikinya, harus dilaksanakan semata-mata untuk kepentingan pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat dari negara yang bersangkutan.”<sup>59</sup>

“Diperkuat dengan diterbitkannya Resolusi PBB Nomor 3201 (S-VI) 1 Mei 1974 dan Deklarasi Pembentukan

55 Nico Schrijver, *Sovereignty Over Natural Resources Balancing Rights and Duties*, (Inggris: Cambridge University Press, 1997), hlm. 1.

56 *Ibid.*, hlm. 10.

57 *Ibid.*

58 Hasan Madjedi, *Pacta Sunt Servanda The Principle and its Application in Petroleum Production Sharing Contract*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2005), hlm. 35.

59 Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1803 (XVII) 14 Desember 1962, antara lain berbunyi: “The right of peoples and nations to permanent sovereignty over their natural wealth and resources must be exercised in the interest of their national development and of the well-being of

Tata Ekonomi Internasional Baru dan Program Hak-Hak Ekonomi dan Kewajiban Negara (*Charter of Economic Rights and Duties of States* (CERDS)) oleh Majelis Umum PBB.”<sup>60</sup>

Ketiga resolusi tersebut dapat menjadi dasar hukum untuk memperkuat hukum positif nasional sekaligus memperkuat langkah pemerintah Indonesia untuk memaksa PT. Freeport Indonesia melakukan penjualan saham yang memang telah secara tertulis ada dalam klausula Pasal 24 ayat (2) Kontrak Karya Tentang Promosi Kepentingan Nasional mengingat bahwa penanaman modal asing dilakukan dengan menghormati kedaulatan dari negara tuan rumah atas kekayaan alam yang dimilikinya dan dilakukan semata-mata untuk kepentingan pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan resolusi Majelis Umum PBB Nomor 626 (VII) 21 Desember 1952, Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1803 (XVII) 14 Desember 1962 dan Resolusi PBB Nomor 3201 (S-VI) 1 Mei 1974 serta Deklarasi Pembentukan Tata Ekonomi Internasional Baru dan Program Hak-Hak Ekonomi dan Kewajiban Negara.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Asas *pacta sunt servanda* yang seringkali dianggap tidak jauh berbeda dengan prinsip

*the people of the States concerned; The exploration, development, and disposition of such resources, as well as the import of the foreign capital required for these purposes, should be in conformity with the rules and conditions which the peoples and nations freely consider to be necessary or desirable with regard to the authorization, restriction, or prohibition of such activities.”*

- 60 Majelis Umum PBB 12 Desember 1974 mengesahkan Resolusi Nomor 3281 (XXIX) mengenai *Charter of Economic Rights and Duties of States* (CERDS). Resolusi yang melahirkan piagam hak-hak dan kewajiban-kewajiban ekonomi memperoleh 120 suara setuju, 6 menentang, dan 10 suara abstain. Negara-negara yang menentang adalah Luxembourg, Jerman, Inggris, Denmark, Belgia, dan Amerika Serikat. Suara yang abstain datang dari Spanyol, Perancis, Norwegia, Kanada, Jepang, Italia, Israel, Islandia, Belanda, dan Austria. *Resolution Adopted by the General Assembly 3281 (XXIX), Charter of Economic Rights and Duties of States.*

kesucian kontrak (*sanctity of contract*) pada hakikatnya ialah sebuah janji yang dibuat akan mengikat para pihak yang membuatnya dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik kemudian dalam perkembangannya janji ini tidak sekadar mengikat tetapi harus dihormati dan dijunjung setinggi-tingginya sebagai sesuatu hal yang suci. Hal ini terjadi karena dalam setiap perjanjian terkandung nilai moral yang menjadi dasar dari sebuah perjanjian.

Divestasi saham merupakan pengalihan saham yang dimiliki oleh penanam modal asing kepada subjek hukum lainnya sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Divestasi saham yang harusnya dilakukan pada tahun 2010 sesuai dengan perintah Pasal 112 dan Pasal 169 huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dijiwai oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 harus tertunda hingga tahun 2018. Hal ini menunjukkan begitu kuatnya pengaruh asas *pacta sunt servanda* terhadap kewajiban divestasi saham.

Namun dengan memperhatikan teori utilitas dari Jeremy Bentham dan prinsip keseimbangan yang dianut oleh masyarakat dunia internasional melalui *Article 62 Vienna Convention on The Law of Treaties* 1969 dan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 626 (VII) 21 Desember 1952, Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1803 (XVII) 14 Desember 1962 serta Resolusi PBB Nomor 3201 (S-VI) 1 Mei 1974 dan Deklarasi Pembentukan Tata Ekonomi Internasional Baru dan Program Hak-Hak Ekonomi dan Kewajiban Negara (*Charter of Economic Rights and Duties of States* (CERDS)) oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menjadi dasar bagi asas *rebus sic stantibus* dan asas *Permanent Sovereignty Over Natural Resources* (PSNR) untuk menyeimbangkan asas *pacta sunt servanda* maka kemudian kewajiban divestasi saham akan dapat diwujudkan. Hanya dengan dirintanginya asas *pacta sunt servanda* maka kewajiban divestasi saham dapat dilakukan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Divestasi Saham dan Mekanisme Penetapan Harga Saham Divestasi pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, maka kewajiban divestasi saham yang optimal yang sesuai dengan semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah kewajiban pengalihan saham hingga 51% dari jumlah saham secara keseluruhan untuk peserta Indonesia yakni Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, BUMN dan BUMD, atau Badan Usaha Swasta Nasional melalui Bursa Efek Indonesia.

### Saran

Di Indonesia terjadi ketimpangan dari sisi teoretis dan praktik terhadap pelaksanaan kontrak. Hal ini terjadi karena seringkali suatu kontrak secara teori dapat dengan mudah dilaksanakan akan tetapi pada praktiknya tidak semudah itu. Ahmad Fikri Assegaf menyatakan bahwa suatu kontrak dapat dilaksanakan dengan baik tanpa timbul suatu masalah merupakan suatu keniscayaan di Indonesia. Oleh karena itu, bukan hanya mekanisme eksekusi atau sistem hukumnya yang perlu ditingkatkan untuk lebih menjamin kepastian hukum namun kesadaran hukum dan budaya hukum dari masyarakat juga perlu ditingkatkan melalui memperbaiki tingkat literasi masyarakat untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai hukum dan membentuk pola-pola tingkah laku yang baru untuk membentuk suatu kesadaran dan budaya hukum yang baru.

Pelaksanaan suatu kontrak baik yang bersifat nasional atau internasional juga dipengaruhi oleh stabilitas sistem hukum suatu negara sehingga untuk meningkatkan stabilitas sistem hukum suatu negara terutama Indonesia diperlukan beberapa pembaharuan dalam sistem informasi sesuai dengan asas-

asas kekuasaan kehakiman yakni cepat, murah, efektif dan efisien serta transparan. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan suatu sistem yang jauh lebih komprehensif dan saling terintegrasi layaknya *big data* di Belanda. Sebuah sistem seperti *big data* di Belanda yang isinya bukan hanya putusan-putusan pengadilan baik Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi tetapi juga dapat berisi penelitian-penelitian berupa jurnal-jurnal ilmiah dan sebagainya yang terlebih dahulu telah difilterisasi untuk dapat dikaitkan dengan setiap putusan yang memerlukan suatu terobosan-terobosan hukum baru. Sehingga dalam sistem tersebut nantinya setiap putusan yang memiliki keterkaitan baik antara Putusan Mahkamah Agung atau dengan Putusan Mahkamah Konstitusi maupun dengan penelitian-penelitian di bidang hukum dapat diakses dalam satu waktu sekaligus dengan konsep "*one clicks for one access*".

Meskipun menurut Sornarajah, kontrak-kontrak pada rezim penguasa sebelumnya akan selalu dipertanyakan keabsahan atau pemanfaatannya pada rezim penguasa setelahnya namun dari perspektif hukum *host country* pada hakikatnya, sangatlah penting untuk mempertimbangkan kembali kontrak-kontrak yang dibuat sebelumnya atau setidaknya mengusahakan agar dilakukan negosiasi ulang terhadap kontrak-kontrak yang hanya mendatangkan sedikit manfaat terhadap negara sehingga bertentangan dengan jiwa Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, perlu dilakukan peninjauan kembali kontrak-kontrak yang merugikan bagi negara baik dalam bentuk kontrak karya, *Production Sharing Contract* atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Bendar, Amin. *Hukum Penanaman Modal Asing Implementasi untuk Pertambangan di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press. 2018.
- Madjedi, Hasan. *Pacta Sunt Servanda The Principle and its Application in Petroleum Production Sharing Contract*. Jakarta: Fikahati Aneska. 2005.
- Parry, David Hughes. *The Sanctity of Contracts in English Law*. London: The Hamlyn Trust. 1959.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Hukum Divestasi di Indonesia (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 2/SKLN-X/2012)*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Schrijver, Nico. *Sovereignty Over Natural Resources Balancing Rights and Duties*. Inggris: Cambridge University Press. 1997.
- Suherman. *Perkembangan Asas Rebus Sic Stantibus (Perubahan Keadaan Fundamental) dalam Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. 2017.
- Trihastuti, Nanik. *Hukum Kontrak Karya Pola Kerjasama Pengusahaan Pertambangan di Indonesia*. Malang: Setara Press. 2013.

### **Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (LN No. 4 Tahun 2009, TLN No. 4959).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)
- United Nations. Vienna Convention on The Law of Treaties 1969.

### **Jurnal**

- Binder, Christina. "The Limits of Pacta Sunt Servanda in International Law". *Leiden Journal of International Law*. Volume 245. (2013).
- Cut Asmaul Husna TR. "Adopsi Prinsip Permanet Soverignty Over Natural Resources (PSNR) Migas". *Jurnal Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Malikusaleh Aceh*. (2016).
- Purwanto, Harry. "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional". *Mimbar Hukum*. Volume 21 No 1 (2009). DOI: <https://doi.org/10.22146/jmh.16252>.
- Wehberg, Hans. "Pacta Sunt Servanda". *American Journal of International Law*, Volume 53 Issue 4. (1959).

### **Internet**

- Kurnianingrum, Trias. "Bagian I Kajian Hukum atas Divestasi Saham Bidang Pertambangan di Indonesia (Studi Kasus PT Newmont Nusa Tenggara dan PT Freeport Indonesia)". [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku\\_lintas\\_tim/buku-lintas-tim-8.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku_lintas_tim/buku-lintas-tim-8.pdf). Diakses 27 Oktober 2018.